

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Pada kesimpulan ini akan dibahas hasil penelitian mengenai kapasitas kelembagaan lokal dan tingkat realisasi program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan. Dilihat dari rumusan masalah berupa hanya sebagian kecil BKM yang efektif dalam menjalankan program PLPBK pada pemanfaatan program (*outcomes*), sebagian hanya pada tahap implementasi (*output*) bahkan ada beberapa yang gagal. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua BKM telah siap, memiliki kapasitas, serta jiwa kerelawanan dalam perwujudan program PLPBK secara efektif. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis, didapat tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil capaian penelitian pertama yang didapat berdasarkan sasaran penelitian yakni menganalisis tingkat realisasi pelaksanaan program PLPBK. Terdapat tiga kesimpulan, antara lain:

- Realisasi pemanfaatan dana BLM di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan

Realisasi pemanfaatan dana BLM yang dijalankan di tujuh kelurahan/desa di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan sudah berjalan cukup baik. BKM di Kelurahan Kebondalem Kabupaten Kendal berjalan paling baik dibandingkan dengan yang lain. Anggaran BLM di kelurahan tersebut telah terserap dengan baik hingga 100% dari yang dianggarkan sebesar 1 M. Sedangkan disisi lain, Kelurahan Kraton Kidul Kota Pekalongan anggaran BLM nya masih belum terealisasi sepenuhnya yakni sebesar 82%.

- Program pemanfaatan dana BLM di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan

Semua BKM yang menjalankan program PLPBK, yakni empat kelurahan di Kabupaten Kendal dan tiga kelurahan di Kota Pekalongan telah menjalankan programnya dengan baik sesuai dengan yang

dianggarkan. Kemudian, BKM yang memiliki tingkat pertanggungjawaban/ transparansi anggaran BLM yang paling baik adalah BKM di Kelurahan Kebondalem dan Plantaran Kabupaten Kendal serta Kelurahan Kramatsari Kota Pekalongan. Ketiga BKM tersebut dianggap paling transparan dalam pertanggungjawaban BLM sebesar 1 M sehingga anggaran yang telah dikeluarkan dapat berfungsi secara maksimal.

- Besaran kemitraan program di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan Kemitraan yang telah dilakukan dalam upaya penataan lingkungan permukiman telah berjalan dengan baik jika dilihat dari besaran anggaran dan pihak yang ikut membantu. Kemitraan yang paling baik dilakukan oleh BKM di Kelurahan Kebondalem Kabupaten Kendal dengan besaran anggaran mencapai 5 M. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat di Kelurahan Kebondalem telah mampu mencari dana dengan baik dalam pengembangan kelurahannya. Meskipun demikian, di kelurahan/desa lainnya pun telah mampu melakukan kemitraan dengan dana yang berbeda-beda. Untuk sumber dana kemitraan di tujuh kelurahan/desa yang menjalankan program PLPBK ini juga cukup bervariasi, diantaranya Ciptakarya, Binamarga, BLH, PSDA, Bank, hingga Universitas.
2. Hasil capaian penelitian kedua yang didapat berdasarkan sasaran penelitian yakni menganalisis kapasitas kelembagaan lokal pada tiga level, yakni level individu, kelompok, dan organisasi. Terdapat empat kesimpulan, antara lain:
- Kapasitas kelembagaan lokal di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan
 Dari hasil skoring pada level individu, kelompok, dan organisasi di tujuh kelurahan/desa yang menjadi sampel penelitian dapat dipahami bahwa secara keseluruhan memiliki kapasitas BKM yang baik dalam menjalankan program PLPBK. Hal ini dapat dilihat dari semua BKM masuk kedalam kelas II yang berkategori baik (skor 4). Untuk BKM yang paling baik adalah BKM di Kelurahan Kramatsari Kota Pekalongan dengan skor 4,5. Sedangkan, BKM yang memiliki skor

paling rendah adalah BKM di Kelurahan Podosugih Kota Pekalongan dengan skor 3,8.

- Kapasitas kelembagaan lokal dilihat dari level individu
 Dalam mengkaji kapasitas kelembagaan lokal pada level individu diukur dari dua indikator, yakni tingkat saling mengenal berupa seberapa anggota yang dikenal dan frekuensi berinteraksi serta tingkat komitmen individu berupa alasan aktif, frekuensi pertemuan, dan ketersediaan waktu luang untuk mengikuti PLPBK. Untuk BKM yang memiliki skor tertinggi adalah Kelurahan Kramatsari Kota Pekalongan dengan skor 5 (sangat baik) yang berarti anggota BKM tersebut memiliki tingkat saling mengenal dan komitmen yang sangat baik dalam menjalankan program PLPBK. Namun, untuk Desa Plantaran Kabupaten Kendal memiliki skor terendah yakni 3,8.
- Kapasitas kelembagaan lokal dilihat dari level kelompok
 Analisis kapasitas kelembagaan lokal pada level kelompok diukur dari empat indikator, yakni tingkat kedekatan antaranggota (*membership*), tingkat kepedulian (*influence*), tingkat ketergantungan antaranggota (*integration and fulfillment of needs*), dan hubungan emosional (*shared emotional connection*). Hasil skoring menunjukkan secara keseluruhan dari empat variabel tersebut, baik BKM di Kabupaten Kendal maupun BKM di Kota Pekalongan memiliki skor 4 yang berarti baik. Untuk skor tertinggi pada level kelompok yang berarti rasa kebersamaan ialah BKM di Kelurahan Kramatsari Kota Pekalongan dengan skor 4,4, sedangkan skor terendah dalam rasa kebersamaan di dalam satu kelompok adalah Kelurahan Podosugih Kota Pekalongan dengan skor 3,5.
- Kapasitas kelembagaan lokal dilihat dari level organisasi
 Kapasitas kelembagaan lokal pada level organisasi dapat diukur dari empat variabel, antara lain tingkat kepemimpinan, tingkat kegotongroyongan, pemahaman tujuan, dan pembagian kerja. Untuk BKM yang memiliki skor tertinggi terdapat 5 BKM, antara lain BKM di Kelurahan Kebondalem, Plantaran, Sidorejo, Kramatasari, dan

Kraton Kidul. Sedangkan, BKM yang memiliki skor terendah adalah BKM Podosugih. Meskipun demikian, baik BKM di Kabupaten Kendal maupun di Kota Pekalongan memiliki skor 4 atau kapasitas BKM pada level organisasi bernilai baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan BKM yang menjadi 10 BKM terbaik dalam menjalankan program PLPBK di Jawa Tengah memang memiliki kapasitas yang baik pula dalam menjalankan program-programnya.

3. Keberlanjutan program PLPBK dilihat dari prinsip keberlanjutan (Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan) bahwa secara aspek sosial dan lingkungan program ini masih dianggap relevan yang ditinjau dari pemanfaatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Akan tetapi, program PLPBK untuk ekonomi kerakyatan hingga saat ini masih dinilai kurang relevan dengan efektivitas pelaksanaan program.
4. *Research question* terjawab dari hasil analisis kapasitas kelembagaan lokal dan efektivitas pelaksanaan program PLPBK. Artinya secara ilmiah telah dapat dibuktikan bahwa kapasitas BKM di empat kelurahan di Kabupaten Kendal dan tiga kelurahan di Kota Pekalongan berbeda-beda dalam upaya pelaksanaan program PLPBK dalam penataan kawasan lingkungan permukiman di perkotaan.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat oleh peneliti, maka diajukan beberapa rekomendasi bagi pemerintah dan kelembagaan lokal serta masyarakat berkaitan dengan kapasitas kelembagaan lokal dan tingkat realisasi pelaksanaan program PLPBK:

1. Rekomendasi untuk pemerintah

Pemerintah kota/kabupaten serta pusat hendaknya melakukan evaluasi rutin dan berkala dalam peningkatan efektivitas program PLPBK yang telah berjalan selama ini, antara lain:

- Dalam program PLPBK sangat dipengaruhi oleh sikap saling percaya (*trust*) yang ada dari penentu kebijakan. Kepercayaan ini ada sebagai langkah awal pemerintah untuk memberikan dana stimulan BLM 1 M

ke tiap-tiap desa yang menjalankan program, sehingga perlu adanya peningkatan sikap saling percaya pada BKM di kabupaten/kota lain yang menjalankan program PLPBK.

- Faktor kemitraan (jaringan kerjasama) dengan pihak luar sangat tinggi terhadap keberhasilan BKM dalam menjalankan program. Hal ini dipengaruhi oleh adanya *networking*, seperti kepercayaan, kekuasaan, dan lainnya. Sehingga perlu adanya upaya peningkatan kerjasama BKM-BKM lain yang menjalankan program PLPBK.
- Perlu adanya pengembangan kapasitas kelembagaan lokal (BKM) sebagai upaya dalam perwujudan program PLPBK secara efektif yang dimana masyarakat sebagai subjek pembangunan melalui pemberdayaan.

2. Rekomendasi untuk BKM dan masyarakat

- BKM bersama masyarakat hendaknya lebih dapat meningkatkan kepercayaan, kerelaan, kepedulian, komitmen di dalam kelompok itu sendiri dalam setiap kegiatan.
- BKM hendaknya mampu meningkatkan kapasitasnya dalam merencanakan dan mengembangkan wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan melalui program PLPBK.
- Masyarakat hendaknya dapat menumbuhkembangkan sikap inisiatif dan kesadaran untuk berperan aktif dalam program PLPBK.

5.3. Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

- Penelitian mengenai pengaruh kemitraan pemerintah daerah terhadap keberhasilan program penataan lingkungan di perkotaan.
- Penelitian mengenai tingkat kedekatan masyarakat dalam upaya keberlanjutan program penataan lingkungan.